

**PERANAN SERIKAT PEKERJA DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN
KERJA BERSAMA SEBAGAI BENTUK *CIVIC DISPOSITION*
(Studi Kasus di PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*



Oleh:
Raudatun Nadiah
2008443

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2024**

**PERANAN SERIKAT PEKERJA DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN
KERJA BERSAMA SEBAGAI BENTUK *CIVIC DISPOSITION*
(Studi Kasus di PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk)**

**Oleh
Raudatun Nadiah
2008443**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

© Raudatun Nadiah
Universitas Pendidikan Indonesia
2024

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,
dengan dicetak ulang, difotokopi, atau cara lainnya tanpa seizin peneliti

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Raudatun Nadiah

NIM. 2008443

**PERANAN SERIKAT PEKERJA DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN
KERJA BERSAMA SEBAGAI BENTUK *CIVIC DISPOSITION***

(Studi Kasus di PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk)

disetujui dan disahkan oleh pembimbing:

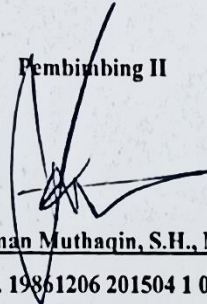
Pembimbing I



Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.A.P., S.H., M.H., M.Si.

NIP. 19690929 199402 1 001

Pembimbing II

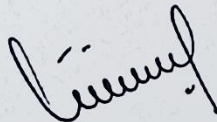


Dwi Iman Muthaqqin, S.H., M.H.

NIP. 19861206 201504 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Dr. Susan Fitriyasari, M.Pd.

NIP. 19820730 200912 2 004

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

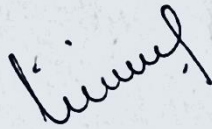
Skripsi telah diuji pada

Hari, Tanggal : **Senin-Rabu, 19-21 Agustus 2024**

Tempat : **Gedung Nu'man Somantri FPIPS UPI**

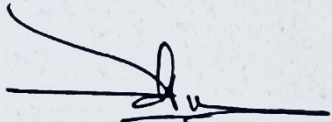
Panitia Ujian terdiri dari :

1. Ketua Prodi PPKn :



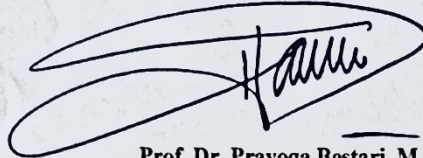
Dr. Susan Fitriasari, M.Pd.
NIP. 19820730 200912 2 004

2. Penguji : **Penguji I,**



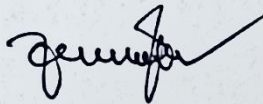
Prof. Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.
NIP. 19600515 198803 1 002

Penguji II,



Prof. Dr. Pravoga Bestari, M.Si.
NIP. 19750414 200501 1 001

Penguji III,



Dr. Asep Mahpudz, M.Si.
NIP. 19661108 199203 1 002

ABSTRAK

RAUDATUN NADIAH (2008443). PERANAN SERIKAT PEKERJA DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA SEBAGAI BENTUK *CIVIC DISPOSITION* (STUDI KASUS DI PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE, TBK)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peranan serikat pekerja dalam pembentukan perjanjian kerja bersama, karena kerap kali masih ada saja pelanggaran perjanjian kerja bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah serikat pekerja di PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk mempunyai peranan signifikan dalam pembentukan perjanjian kerja bersama sebagai bentuk *civic disposition*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, dan melakukan validitas data dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi partisipasi serikat pekerja dalam pembentukan perjanjian kerja bersama di PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk sudah sesuai dengan regulasi yang mengatur, di mana perjanjian kerja bersama tersebut dibentuk oleh serikat pekerja dan pengusaha yang memuat hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha berdasarkan asas kesepakatan sehingga aturan yang dibentuk dapat mencapai keadilan dan tidak menimbulkan ketimpangan terhadap salah satu pihak. Dengan adanya pengimplementasian partisipasi serikat pekerja dalam pembentukan perjanjian kerja bersama memberikan dampak atau akibat positif secara hukum, yakni perjanjian kerja bersama tersebut menjadi legal atau sah di mata hukum. Adapun hambatan yang tidak dapat dihindari oleh serikat pekerja dan pengusaha tidak lain adalah perbedaan pendapat yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan dilibatkannya serikat pekerja pada pembentukan perjanjian kerja bersama merupakan implementasi dari konsep *civic disposition*, yakni sebagai sikap dan perilaku warga negara yang bertanggung jawab, peduli terhadap kepentingan publik, dan dapat berkontribusi secara positif.

Kata Kunci: Serikat Pekerja, Perjanjian Kerja Bersama, *Civic Disposition*

ABSTRACT

RAUDATUN NADIAH (2008443). THE ROLE OF TRADE UNIONS IN THE FORMATION OF COLLECTIVE LABOUR AGREEMENTS AS A FORM OF CIVIC DISPOSITION (CASE STUDY AT PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE, TBK)

This research is motivated by the importance of the role of trade unions in the formation of collective labour agreements, because there are often still violations of collective labour agreements. This study aims to determine whether the trade union at PT Primarindo Asia Infrastructure, Tbk has a significant role in the formation of collective labour agreements as a form of civic disposition. This research uses qualitative method with case study method. The data collection techniques used are observation, interview, and documentation. Data analysis techniques are done by reducing data, presenting data, drawing conclusions and verification, and performing data validity by triangulation. The results showed that the implementation of trade union participation in the formation of collective labour agreements at PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk is in accordance with the governing regulations, where the collective labour agreement is formed by trade unions and employers that contain the rights and obligations of workers and employers based on the principle of agreement so that the rules formed can achieve justice and do not cause inequality to either party. The implementation of trade union participation in the formation of collective labour agreements has a positive legal impact or effect, namely that the collective labour agreement becomes legal or valid in the eyes of the law. The obstacles that cannot be avoided by trade unions and employers are none other than differences of opinion influenced by internal and external factors. The results show that the involvement of trade unions in the formation of collective labour agreements is an implementation of the concept of civic disposition, which is the attitude and behaviour of citizens who are responsible, care about the public interest, and can contribute positively.

Keywords: Trade Unions, Collective Labour Agreement, Civic Disposition

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Segi Teoretis.....	8
1.4.2 Segi Praktis.....	8
1.4.3 Segi Kebijakan	8
1.4.4 Segi Isu serta Aksi Sosial	8
1.5 Struktur Organisasi Skripsi	8
1.5.1 BAB I Pendahuluan.....	8
1.5.2 BAB II Kajian Pustaka	8
1.5.3 BAB III Metode Penelitian.....	9
1.5.4 BAB IV Temuan dan Pembahasan.....	9
1.5.3 BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan tentang Ketenagakerjaan dan Aspek Yuridisnya	10
2.1.1 Definisi Ketenagakerjaan	10
2.1.2 Objek Ketenagakerjaan	12
2.1.3 Subjek Ketenagakerjaan	13
2.1.4 Ruang Lingkup Ketenagakerjaan	13
2.1.5 Tinjauan tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	15
2.1.6 Perkembangan Ketenagakerjaan	19
2.2 Tinjauan tentang <i>Civic Disposition</i>	22
2.3 Tinjauan tentang Teori Keadilan.....	26
2.3.1 Teori Keadilan Aristoteles.....	27

2.3.2 Teori Keadilan John Rawls	28
2.4 Tinjauan tentang Perjanjian Kerja Bersama.....	30
2.5 Kerangka Berpikir	35
2.6 Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Desain Penelitian.....	38
3.1.1 Pendekatan Penelitian.....	38
3.1.2 Metode Penelitian.....	39
3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian.....	41
3.2.1 Partisipan Penelitian	41
3.2.2 Tempat Penelitian.....	41
3.3 Instrumen Penelitian.....	42
3.4 Prosedur Penelitian.....	42
3.4.1 Tahap Pra Penelitian.....	42
3.4.2 Tahap Perizinan Penelitian	43
3.4.3 Tahap Pelaksanaan Penelitian	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5.1 Observasi	44
3.5.2 Wawancara	45
3.5.3 Dokumentasi.....	45
3.6 Teknik Analisis Data.....	46
3.6.1 Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	46
3.6.2 Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	46
3.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (<i>Conclusion Drawing and Verification</i>).....	47
3.7 Validitas Data	47
3.7.1 Perpanjangan Pengamatan.....	47
3.7.2 Meningkatkan Ketekunan.....	48
3.7.3 Triangulasi.....	48
3.7.4 Menggunakan Bahan Referensi.....	49
3.7.5 <i>Member Check</i>	49
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
4.1.1 Profil PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk.....	50

4.1.2 Visi dan Misi PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk	51
4.1.3 Struktur Organisasi dan Struktur Kepemilikan PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk.....	51
4.1.4 Profil PUK FSP TSK KSPSI PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk...	53
4.1.5 Visi dan Misi PUK FSP TSK KSPSI PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk	54
4.1.6 Struktur Organisasi PUK FSP TSK KSPSI PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk.....	55
4.2 Deskripsi Hasil Temuan Penelitian	56
4.2.1 Implementasi Partisipasi Serikat Pekerja dalam Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama sebagai Bentuk <i>Civic Disposition</i>	58
4.2.2 Akibat Hukum dari Pengimplementasian Partisipasi Serikat Pekerja dalam Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama sebagai Bentuk <i>Civic Disposition</i>	71
4.2.3 Hambatan dan Solusi dalam Pengimplementasian Partisipasi Serikat Pekerja dalam Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama sebagai Bentuk <i>Civic Disposition</i>	81
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	91
4.3.1 Implementasi Partisipasi Serikat Pekerja dalam Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama sebagai Bentuk <i>Civic Disposition</i>	91
4.3.2 Akibat Hukum dari Pengimplementasian Partisipasi Serikat Pekerja dalam Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama sebagai Bentuk <i>Civic Disposition</i> ..	100
4.3.3 Hambatan dan Solusi dalam Pengimplementasian Partisipasi Serikat Pekerja dalam Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama sebagai Bentuk <i>Civic Disposition</i>	104
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI	108
5.1 Simpulan	108
5.1.1 Simpulan Umum.....	108
5.1.2 Simpulan Khusus.....	109
5.2 Implikasi.....	110
5.2.1 Implikasi Teoritis	111
5.2.2 Implikasi Praktis.....	111
5.3 Rekomendasi	111
5.3.1 Bagi Serikat Pekerja	112
5.3.2 Bagi Pengusaha	112
5.3.3 Bagi Pekerja	112
5.3.4 Bagi Akademisi	112

5.3.5 Bagi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	112
5.3.6 Bagi Peneliti Selanjutnya	113
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Partisipan Penelitian.....	41
Tabel 4. 1 Data Informan Penelitian	56
Tabel 4. 2 Hasil Matriks Triangulasi Sumber Mengenai Rumusan Masalah Pertama.....	65
Tabel 4. 3 Hasil Matriks Triangulasi Teknik Mengenai Rumusan Masalah Pertama.....	70
Tabel 4. 4 Hasil Matriks Triangulasi Sumber Mengenai Rumusan Masalah Kedua	76
Tabel 4. 5 Hasil Matriks Triangulasi Teknik Mengenai Rumusan Masalah Kedua	80
Tabel 4. 6 Hasil Matriks Triangulasi Sumber Mengenai Rumusan Masalah Ketiga	87
Tabel 4. 7 Hasil Matriks Triangulasi Teknik Mengenai Rumusan Masalah Ketiga	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian	35
Gambar 3. 1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	49
Gambar 4. 1 PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk.....	51
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk	52
Gambar 4. 3 Struktur Kepemilikan PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk.....	53
Gambar 4. 4 Profil PUK FSP TSK KSPSI PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk	54
Gambar 4. 5 Struktur Organisasi PUK FSP TSK KSPSI PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk.....	55
Gambar 4. 6 Bagan Implementasi Partisipasi Serikat Pekerja dalam Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama.....	98
Gambar 4. 7 Bagan Akibat Hukum dari Pengimplementasian Partisipasi Serikat Pekerja dalam Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama	104
Gambar 4. 8 Bagan Hambatan dan Solusi dalam Pengimplementasian Partisipasi Serikat Pekerja dalam Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama sebagai Bentuk <i>Civic Disposition</i>	107

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Cholisin. (2007). *Ilmu Kewarganegaraan - Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Universitas Terbuka.
- Creswell, J.W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Edisi Ketiga). Thousand Oaks: Sage.
- Fiantika, F.R. dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Hanifah, I. (2020). *Buku Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Harahap, A. M. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (B. S. Panjaitan (ed.); 1st ed.). Literasi Nusantara.
- Lebacqz, K. (2015). *Teori-Teori Keadilan: Six Theories of Justice*. Bandung: Nusa Media.
- Mawardi Khairi, S. H., Lelisari, S. H., Nurjannah, S., SH, M., Novita Listyaningrum, S. H., & Inggit Akim, S. H. (2021). *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Deepublish.
- Nurachmad, M. (2013). *Panduan Membuat Peraturan dan Perjanjian dalam Perusahaan*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Pujiastuti, E. (2008). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (1st ed.). Semarang University Press.
- Rahayu, D. (2019). *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Santoso, B. (2012). *Hukum Ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja Bersama: Teori, Cara Pembuatan, dan Kasus*. Malang: UB Press.
- Suhartini, E., Yumarni, A., Maryam, S., & Mulyadi. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Telaumbanua, D. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*. Madura: UTM Press.
- Yusuf, A.M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana.

Sumber Artikel Jurnal

- Adha, M. M., & Ulpa, E. P. (2020). Pendidikan Karakter: Aktivitas Sukarelawan Muda Era Modern Bekerja Secara Daring dan Luring di Lokasi Cultural Event. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn*, 7(2), 96-102.
- Anggraini, E. S. (2023). Peran Serikat Pekerja Dalam Hal Perselisihan Hubungan Kerja Yang Berdampak Pada Pemutusan Hubungan Kerja. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(3), 349-361.

- Arif, D. B. (2016). Pengembangan komponen kompetensi kewargaan dalam buku teks Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(1).
- Branson, M.S. (1998). The Role of Civic Education. Center for Civic Education. https://www.civiced.org/papers/articles_role.html.
- Butarbutar, E. N. (2012). Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 354. <https://doi.org/10.22146/jmh.16262>
- Dwisvimiari, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522-531.
- Dhulhijjahyani, F. (2014). Peran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dalam memperjuangkan kesejahteraan karyawan dilihat dari nilai-nilai pancasila khususnya sila ke-5\.
- Fadillah, N. (2021). hukum ketenagakerjaan.
- Fusnika, F. (2014). Pembinaan civic disposition berbasis nilai-nilai kemanusiaan pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah tinggi ilmu Kesehatan kota sukabumi. *JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 23, No. 1, Edisi Juni 2014.
- Halim, H. (2018). Asas keadilan dalam syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. *JIAGANIS*, 3(2).
- Istijab. (2022). Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Di Perusahaan (Sebuah Studi Pasal 5 Permennaker RI Nomor 28 Tahun 2014). *YURIJAYA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1).
- Jemarut, W., Andriani, I. G. A., & Rizal, P. (2023). Penetapan Upah Minimum dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 133-144.
- Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Lutz-Bachmann, M. (2000). The Discovery of a Normative Theory of Justice in Medieval Philosophy: On the Reception and Further Development of Aristotle's Theory of Justice by St. Thomas Aquinas. *Medieval Philosophy and Theology*, 9(1), 1-14.
- Malatuny, Y. G., & Rahmat, R. (2017). Pembelajaran Civic Education Dalam Mengembangkan Civic Disposition. *PEDAGOGIKA: Jurnal Pedagogik dan Dinamika Pendidikan*, 5(1), 56-68.
- Nita, S., & Susilo, J. (2020). Peranan Serikat Pekerja Dalam Membentuk Perjanjian Kerja Bersama Sebagai Hubungan Kerja Ideal Bagi Pekerja Dengan Pengusaha. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 6(2), 143-152.
- Pratiwi, C. L. (2021). Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Berdasarkan Asas Kebebasan Berserikat. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.19184/ijl.v1i2.21975>
- Priyo, S., & Teguh, G. (2013). Efektivitas Peranan Serikat Pekerja dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (Studi di Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja PT. Ekamas Fortuna Kabupaten Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

- Rangga, S. (2023). Pengaruh Kecerdasan Interpersonal Terhadap Civic Disposition Mahasiswa Ppkn Fkip Universitas Lampung.
- Safa'at, M. A. (2011). Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls). Dikutip <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/1>.
- Shelina, N., Yanzi, H., & Mentari, A. (2019). Peran Pembelajaran PPKn dalam Membentuk Sikap Demokratis untuk Meningkatkan Civic Disposition Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(2).
- Sinambela, S. M., Ningsih, P. W., Aridho, A., Lumbantobing, J. N. Y., Simbolon, N. A., Sinaga, R. S., ... & Ibrahim, M. (2024). Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *Hakim*, 2(1), 25-43.
- Sitohang, M. (2024). Menguji Keadilan Dalam penerapan Hak Pensiun Menurut UU Ketenagakerjaan. *Honeste Vivere*, 34(1), 52-62.
- Soewono, D. H. (2019). Peran Serikat Pekerja Dalam Menciptakan Hubungan Industrial Di Perusahaan. *Jurnal Hukum Unik Kediri* (2019)(21), 1-13.
- Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional (Vol. 4, Issue 1).
- Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 001-022.
- Sundari, P. (2019). Peran Serikat Pekerja dalam Mengoptimalkan Kualitas Hubungan Industrial: studi Kasus Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Rekomendasi*, 2(2), 288840.
- Vieru, S. (2010). Aristotle's Influence on the Natural Law Theory of St Thomas Aquinas. *The Western Australian Jurist*, 1, 115-122.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Bandut, S. (2020). Keterlibatan warga negara di desa sompang kolang dalam pembangunan berkelanjutan bidang ekonomi dengan memproduksi gula aren. *Jurnal Civic Hukum*, 5(1), 23-33.
- Waty, D. N., Nurmalisa, Y., & Putri, D. S. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Civic Disposition Di SMP Gajah Mada Bandar Lampung. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 9(1).
- Winarningsih, W., Lestari, V., Wardani, R., & Adha, M. M. (2021). Penguatan Civic Virtue Pada Pembelajaran PPKN Dalam Rangka Menghadapi Era Society 5.0.
- Yuanita, A. C. (2022). Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 3(2), 130-142.

Sumber Internet

- Sutriyanto, E. (2018, 30 Oktober). Langgar Perjanjian Kerja Bersama, PT. Pos Indonesia Digugat Pekerja. [Online]. Diakses dari https://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/30/langgar-perjanjian-kerja-bersama-pt-pos-indonesia-digugat-pekerja#google_vignette
- Widyastuti, R.A.Y. (2021, 13 April). Konflik KFC dan Pegawai Akibat 30 Persen Upah Dipangkas, Begini Duduk Perkaranya. [Online]. Diakses dari https://bisnis.tempo.co/read/1452163/konflik-kfc-dan-pegawai-akibat-30-persen-upah-dipangkas-begini-duduk-perkaranya?page_num=3

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh